



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/285 /2021

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA DAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK
BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal se Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/2396/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Permohonan Asman Konsep Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan Antar Sub Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

84

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

8 1

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 37);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
 - b. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal; dan
 - c. Kecamatan Brangsong.
- KEDUA : Rincian Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pergeseran anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 Agustus 2021



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Arsip.

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA DAN ANTAR SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
SEKRETARIAT DAERAH, DAN KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/2851/2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		PENETAPAN	PERGESERAN TERAKHIR	SETELAH PERGESERAN TERAKHIR			
2.08.01	1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	4	5	6 (5-4)	7	
2.08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
2.08.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2.08.01.01.2.02.01.5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.744.680.420,00	4.339.680.420,00	4.339.680.420,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.744.680.420,00	4.339.680.420,00	4.339.680.420,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.989.680.420,00	2.989.680.420,00	2.989.680.420,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.141.521.228,00	2.141.521.228,00	2.071.521.200,00	-	✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.141.521.228,00	2.141.521.228,00	2.071.521.200,00	-	70.000.028,00	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.141.521.228,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.702.576,00	196.702.576,00	196.702.576,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	-	196.702.576,00	196.702.576,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	196.702.576,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	-	224.000.000,00	224.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	224.000.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	70.000.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	-	91.000.000,00	91.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	91.000.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.004.000,00	25.004.000,00	85.003.996,00	59.999.996,00	✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	25.004.000,00	85.003.996,00	59.999.996,00	✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	25.004.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	252.616,00	252.616,00	252.616,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	252.616,00	252.616,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	252.616,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	168.000.000,00	168.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	168.000.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.000.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.200.000,00	7.200.000,00	17.200.032,00	10.000.032,00	✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	-	7.200.000,00	17.200.032,00	10.000.032,00	✓	
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.200.000,00	-	-	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-		
2.08.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	60.000.000,00	-	-	-		

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			BERTAMBAHBERK URANG	KET
		PENETAPAN	PERGESERAN TERAKHIR	SETELAH PERGESERAN TERAKHIR		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00	✓
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00	✓
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00	✓
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00	✓
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	

BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN					BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		PENETAPAN	PERGESERAN TERAKHIR	SETELAH PERGESERAN TERAKHIR				
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			

BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN					BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		PENETAPAN	PERGESERAN TERAKHIR	SETELAH PERGESERAN TERAKHIR	6 (5-4)	7		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	-		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-	-		

BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN					BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		PENETAPAN	PERGESERAN TERAKHIR	SETELAH PERGESERAN TERAKHIR				
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7		
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.187.500,00	110.187.500,00	110.187.500,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.968.330,00	83.968.330,00	83.968.330,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.166.770,00	51.166.770,00	51.166.770,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.251.810,00	58.251.810,00	58.251.810,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.072.621,00	30.072.621,00	30.072.621,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.690,00	29.690,00	29.690,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	32.951.946,00	32.951.946,00	63.000.000,00	30.048.054,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.493.715,00	10.493.715,00	10.493.715,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Luran Jaminan Kematian PNS	3.578.000,00	3.578.000,00	4.900.000,00	1.322.000,00			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			
7.01.08.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.313.600,00	579.472.000,00	579.472.000,00	-			

BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO